

ABSTRAK

Pemenuhan hak konstitusional warga negara merupakan tanggung jawab negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh warganya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan, dan pencegahan pada masalah sosial. Tereksklusinya PRT dari ranah ketenagakerjaan menyebabkan hak konstitusionalnya sebagai pekerja maupun warga negara tidak terpenuhi.

Penelitian ini menggunakan metode *socio-legal research* dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara PRT dari anggota SPRT Tunas Mulia Yogyakarta, DP3AP2KB DIY, Disnaker DIY, DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, LSM RTND, dan beberapa Pemberi Kerja.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pemenuhan hak konstitusional PRT belum terwujud secara penuh, ditinjau dari substansi hukum peraturan yang hanya berfungsi sebagai pengakuan yuridis dan belum cukup memberikan perlindungan bagi PRT. Implementasi peraturan oleh struktur hukum tidak terlaksana dengan baik akibat ketidakseriusan dari struktur hukum dan budaya hukum di masyarakat yang masih menganggap rendah PRT karena latar belakang pendidikan, ekonomi, dan sosial PRT yang rendah. Masyarakat terutama Pemberi Kerja masih banyak yang belum sadar akan hak-hak PRT. Oleh karena itu peran SPRT Tunas Mulia Yogyakarta dan LSM RTND menjadi penting dalam memperjuangkan pemenuhan hak konstitusional PRT.

Kata Kunci: Hak Konstitusional; PRT; Serikat Pekerja Rumah Tangga.

ABSTRACT

Fulfilling the constitutional rights of citizens has become the responsibility of the state in order to realize general welfare and social justice for all its citizens through services, assistance, protection and prevention of social problems. The exclusion of domestic workers from the realm of employment means that their constitutional rights as workers and citizens are not fulfilled.

The method used in this research is socio-legal with the research specification is descriptive analysis. The data used are primary data and secondary data. Data collection was carried out through observation and interviews with domestic workers from SPRT Tunas Mulia Yogyakarta, DP3AP2KB DIY, Disnaker DIY, DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, RTND, and several employers.

The results of this study state that the fulfillment of the constitutional rights of domestic workers has not been fully realized, in terms of the legal substance of the regulations only function as juridical recognition and have not provided enough protection for domestic workers. The implementation of regulations by the legal structure is not carried out properly due to the lack of seriousness of the legal structure and legal behavior from society still despise domestic workers because of their low educational, economic and social background. Many people, especially employers, are still not aware of the rights of domestic workers. Therefore, the role of the SPRT Tunas Mulia Yogyakarta and RTND is important to fight for the fulfillment of the constitutional rights of domestic workers.

Keywords: *Constitutional Rights; Domestic Workers; Domestic Workers Union.*